

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Definisi kinerja keuangan

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa kinerja merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi keuangan perusahaan baik menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal,

likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan.

Menurut situs web Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banjar, kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi Pemerintah Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Syamsi (1986) dalam Giftovel Rondonuwu (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pengukuran kinerja

Menurut Mahmudi (2019: 45) penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Selain itu, ukuran

kinerja tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan arah atau tonggak-tonggak (milestone) sejauh mana tujuan organisasi tercapai.

Muhmudi (2019: 60) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009: 121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan,
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Sujarweni (2015: 107-108) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

- a. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
- b. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
- c. Mewujudkan tanggung jawab publik.
- d. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
- e. Mengalokasikan sumber daya.
- f. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
- g. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka organisasi sektor publik akan mendapat manfaat langsung yaitu:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan publik atau masyarakat telah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Sujarweni (2015: 109-114) informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu:

1. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisi atau perbedaan) antara kinerja actual dengan anggaran yang dianggarkan .

Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- a. Varians pendapatan (*revenue varians*)
- b. Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
 - 1) Varians belanja rutin
 - 2) Varians belanja investasi/modal (*recurrent expenditure variance*)

Setelah dilakukan analisis varians maka tahap selanjutnya dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.

2. Informasi non finansial

Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah *Balanced Scorecard*.

Metode *Balanced Scorecard* merupakan pengukuran kinerja organisasi berdasarkan aspek finansial dan juga aspek nonfinansial. *Balanced Scorecard* dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena *Balanced Scorecard* tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016: 5) laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti.

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait.

Menurut situs web pengertian laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran laporan keuangan yang harus disusun dengan standar akuntansi, kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya, dikenal beberapa macam laporan keuangan, seperti berikut ini.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016: 7-9), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri atas berikut ini:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akurat) adalah hak pemerintah yang dilakukan sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja (basis kas) adalah suatu pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis akurat) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- c. Transfer adalah penerima pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas peapor lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- e. Penerimaan pembiayaan, antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posiss keuangan satu etika pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas.
- b. Investasi jangka pendek.
- c. Piutang pajak dan bukan pajak.
- d. Persediaan.
- e. Investasi jangka panjang.
- f. Asset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek.
- h. Kewajiban jangka panjang.
- i. Ekuitas dana.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir has pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah suatu aliran kas aynag masuk ke bendahara umum daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun laporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis kas.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

5) Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain laporan-laporan keuangan pokok entitas pelaporan, dalam hal ini pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

c. **Dasar Hukum Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah**

Menurut Ramli (2016: 9-10), Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khusus bagian yang mengatur keuangan negara.
- 2) Undang-Undang di bidang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah, khusus yang mengatur keuangan daerah.
- 5) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- 6) Ketentuan perundang-undang tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan
- 7) Peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ramli (2016: 10-12), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masalah atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Informasi yang relevan adalah seperti berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan penggunaan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat predikatif (*predictive value*). Informasi dapat membantu penggunaan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kelainan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bilah entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabilah entitas pemerintahan akan menerapkan kebijakan akauntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akauantansi yang sekarang diterapkan,

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada catatan atas laporan keuangan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

e. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ramli (2016: 15), Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya secara spesifik. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara berikut ini:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

3. *Value For Money*

a. Definisi *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009: 04) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. *Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value For Money* dapat tercapai apabila organisasi telah

menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Abdul dan Iqbal *Value For Money* adalah anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan *value For Money* yaitu pengukuran anggaran berbasis kinerja yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

b. Manfaat *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009: 07) manfaat konsep *value for money* pada organisasi sektor publik, sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Pengukuran *Value For Money*

Berdasarkan Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai *value for money* yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E :

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 163), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya.

Menurut Mardiaso (2009:04), Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dengan anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas Pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penggunaan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

b. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*)

dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

d. Standar Efektivitas

Standar efektivitas menurut Mahsun (2016: 187-188) dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2. Efisiensi

a. Definisi Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*).

Menurut Abdul dan Muhammad (2019: 163), Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan.

Menurut Mardiasmo (2009: 04), Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau

penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu rasio perhitungan perbandingan antara *input* yang seminimalnya untuk mencapai *output* yang semaksimalnya. Semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

b. Indikator Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Masukkan Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal).

c. Tindakan Memperbaiki Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019: 85), karena efisiensi merupakan suatu rasio maka untuk memperbaiki efisiensi dapat dilakukan tindakan berikut :

- 1) Meningkatkan *output* untuk jumlah *input* yang sama.
- 2) Meningkatkan *output* dengan proporsi kenaikan *output* yang lebih besar dibandingkan proporsi kenaikan *input*.
- 3) Menurunkan *input* untuk jumlah *output* yang sama.
- 4) Menurunkan *input* dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan *output*.

d. Pengukuran Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019: 86), untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Biaya standar menunjukkan biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan *output* tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya.

Menurut Mardiasmo (2009: 133), Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

e. Standar Efisiensi

Standar efisiensi menurut Mahsun (2016: 187) dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

3. Ekonomis

a. Definisi Ekonomis

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 163), Ekonomis adalah hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu.

Menurut Mardiasmo (2009: 131), Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

Menurut Mardiasmo (2009: 04), Ekonomi yaitu pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomis merupakan hubungan antara nilai uang (pasar) dan masukkan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Ekonomis belanja daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penggunaan belanja daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

b. Pengukuran Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2009: 133), Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Dengan demikian ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

c. Standar Ekonomis

Standar ekonomis menurut Mahsun (2016: 186-187) dapat diketahui ekonomis atau tidak dengan memnuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

4. *Outcome*

Menurut Mardiasmo (2009: 134-135) *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu:

a. Peran Retrospektif

Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja pada masa lalu.

b. Peran Prospektif

Peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Mardiasmo (2009: 5-6) menjelaskan sistem pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

1) Pengukuran *Input*

Pengukuran *input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

2) Pengukuran *Output*

Pengukuran *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas dan kebijakan.

3) Pengukuran *Outcome*

Pengukuran *outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar penilaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Abdul dan Iqbal (2019: 222), APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan paragrah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Deddi dkk, (2009: 40), menyebutkan bahwa secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. sebaliknya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 223), fungsi APBD adalah:

1) Fungsi Otorisasi

Bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2) Fungsi Perencanaan

Bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Melalui APBD pemerintah daerah dapat:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

3) Fungsi Pengawasan

Bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. dengan

APBD dapat dihindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

4) Fungsi Alokasi

Bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah. APBD memuat pendapat yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.

5) Fungsi Distribusi

Bahwa kebijakan-kebijakandalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Fungsi Stabilisasi

Bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Nurlan (2008: 133), fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akauntansi dan pelaporan dan keuangan, antara lain karena:

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 2) Anggaran merupakan target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

c. Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 225), APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan

daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewangan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan APBD yang lain yaitu:

- 1) Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah.
- 3) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemrioritasan.
- 4) Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Dengan menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Kinerja Kantor Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe dengan menggunakan konsep *value for money*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian

deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini yaitu (1) Rasio ekonomis pada dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tahun 2014-2016 sebesar 86,54%, 82,64%, 71,43% menunjukkan rasio ini bernilai ekonomis. (2) Rasio efisiensi kinerja Kemerintah Kota Lhokseumawe cukup baik, pada tahun 2014 nilai rasio efisiensi diperoleh sebesar 94,69%, dan tahun 2015 naik menjadi 105,17% dan tahun 2016 turun menjadi 97,95%, meskipun tahun 2015 menunjukkan rasio yang kurang efisien. (3) Rasio efektivitas pada Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2014-2016 dengan nilai rasio sebesar 96,53%, 86,65%, 76,98% rasio efektivitas yang bernilai < 100% menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun tersebut yang dinilai tidak efektif.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Wardiman Zain (2018) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 dikatakan ekonomis karena memiliki rata-

rata rasio ekonomi dibawah 100% sebesar 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rasio efisiensi sebesar 96,85%. Dari segi efektivitas rata-rata rasio dari tahun 2012-2016 sebesar 96,05% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Jaenuri (2016) dengan judul Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio kemandirian, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktifitas keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bojonegoro lebih unggul apabila dibandingkan Kabupaten Jombang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Melania, dkk (2016) dengan judul Analisis Efektifitas dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan anggaran belanja dari badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA di Kota Manado. Jenis penelitian yg digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara

kualitatif. data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah (1) tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014, 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun berbeda ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. (2) tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah diolah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indrayani dan Khairunnisa (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe	Persamaan Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, data yang diperlukan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, analisis data kualitatif	Perbedaannya pada variabel dan objek tempat penelitian
2.	Wardiman Zain (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan <i>Value For Money</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian
3.	Jaenuri (2016)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014.	Sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian
4.	Melania, dkk (2016)	Analisis Efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado	Persamaan Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, data yang diperlukan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara, analisis data kuantitatif dan kualitatif	Perbedaannya pada penelitian ini adalah objek dan tempat penelitian dan variabel

Sumber : Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut V. Wiratna (2019: 16) jenis penelitian ini dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui masing-masing nilai variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komperatif

Penelitian komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian asosiatif/hubungan

Penelitian asosiatif adalah yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mengukur kinerja dengan pendekatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dengan mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten Arivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasional Variabel

Menurut V. Wiratna (2019: 77), Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berljalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturana perundang-undang	1. Ekonomis 2. Efisiensi 3. Efektivita 4. <i>Outcome</i>

Sumber : Penulis, 2020

D. Data yang Diperlukan

Menurut V. Wiratna (2019: 89), menjelaskan berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner kelompok focus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2015-2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut V. Wiratna (2019: 93-95) teknik pengumpulan data penelitian yang biasa digunakan yang diadaptasi dari buku Asmani (2011) sebagai berikut :

1. Tes

Tes adalah instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Kuesioner atau Angket (*Questionnaire*)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.

5. Survei (*Survey*)

Survei adalah survei yang digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

6. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah analisis dokumen yang lebih mengarah pada bukti konkret.

Meteode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen yang diperoleh langsung dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

F. Analisa Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut V. Wiratna (2019: 111), analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata atau depan didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan.

b. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah data berupa angka dalam arti sebenarnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif digunakan untuk membandingkan antara teori dengan fakta yang ada. Analisis Kuantitatif yaitu menghitung dan membuat rasio-rasio keuangan daerah, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun 2015-2019.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang didukung oleh teori-teori yang relevan, dan analisis kuantitatif dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menghitung perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan *outcome*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten Arivai No. 51 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Nomor 1814).

Berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dimana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Sekarang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas digantikannya Biro Keuangan Menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Selatang Yang berkantor di Jalan Merdeka No. 8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2012 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan keuangan dan daerah.

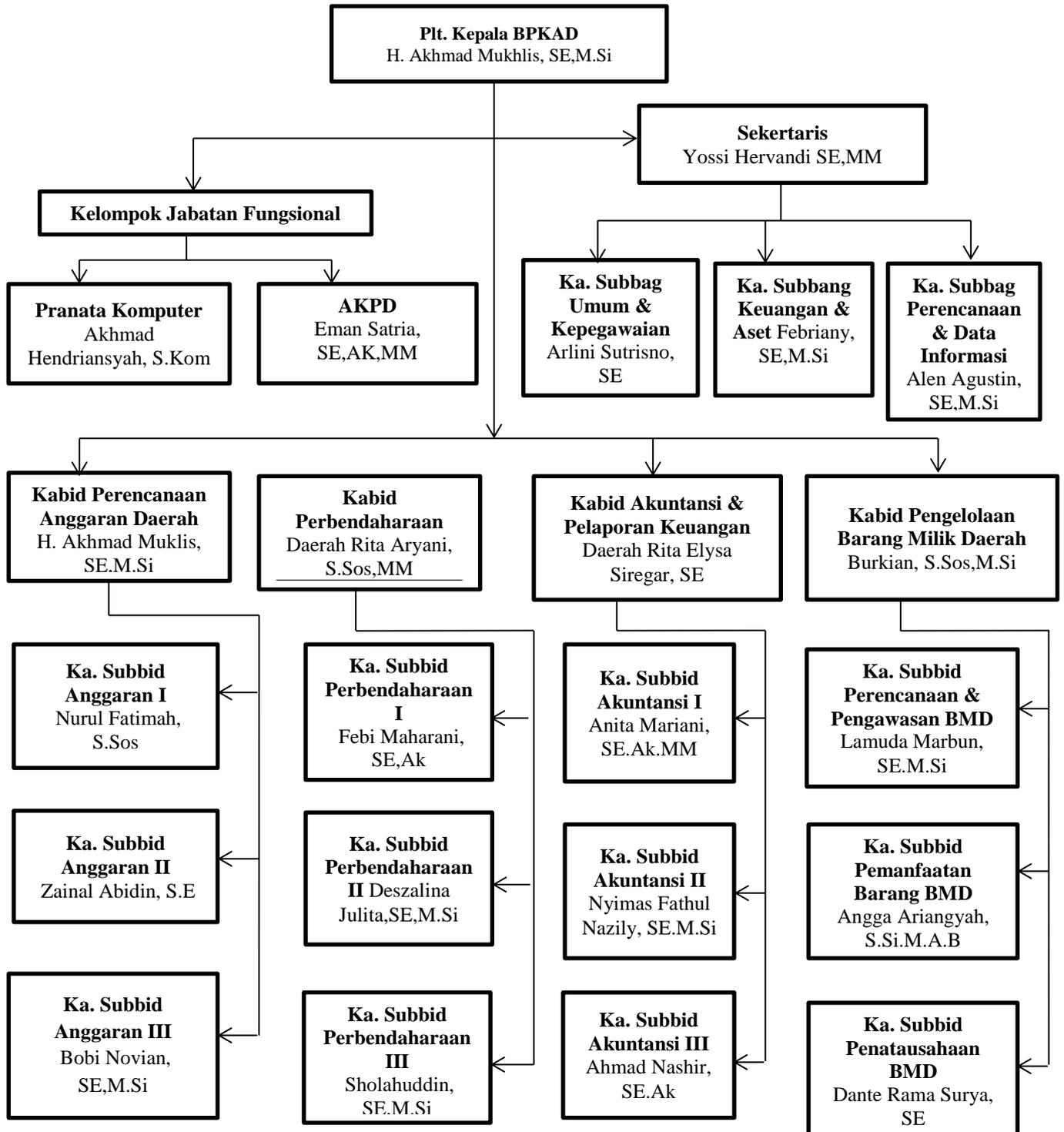
2. Strktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

- a. Kepala Badan BPKAD : H. Akhmad Mukhlis, SE.,M.Si.
- b. Secretariat : Yossi Hervandi, SE.,MM, membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Data Informasi : Alen Agustin, SE.,M.Si.
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset : Febriany, SE.,M.Si.
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian : Arlini Sutrisno, SE.
- c. Badan Perencanaan Anggaran Daerah : H. Akhmad Mukhlis, SE.,M.Si, membawahi :
 - 1) Subbidang Anggaran I : Nurul Fatimah, S.Sos.
 - 2) Subbidang Anggaran II : Zainal Abidin, SE.

- 3) Subbidang Anggaran III : Bobi Novian, SE.,M.Si.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah : Rita Aryani, S.Sos.,MM, membawahi:
- 1) Subbidang Perbendaharaan I : Febi Maharani, SE.,Ak.
 - 2) Subbidang Perbendaharaan II : Deszalina Juita, SE.,M.Si.
 - 3) Subbidang Perbendaharaan III : Sholahuddin, SE.,M.Si.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah : Rita Elysa Siregar, SE, Membawahi :
- 1) Subbidang Akuntansi I : Anita Mariani, SE.,Ak.,MM.
 - 2) Subbidang Akuntansi II : Nyimas Fathul Nazily, SE.,Ak.
 - 3) Subbidang Akuntansi III : Ahmad Nashir, SE.,Ak.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah : Burkian, S.Sos.,M.Si, membawahi :
- 1) Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah : Lamuda Marbun, SE.,M.Si.
 - 2) Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah : Angga Ariansyah, S.Si.M.A.B.
 - 3) Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah : Dante Rama Surya, SE
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Pranata Komputer : Akhmad Hendriansyah, S.Kom.
 - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) : Eman Satria, SE.,Ak.,MM.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan



3. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Selatan

a. Visi

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung sumsel sejahtera lebih maju dan berdaya saling internasional.

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi yaitu :

- 1) Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan asset daerah.
- 2) Menciptakan pelayanan prima keuangan dan asset daerah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Disini akan dilakukan pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis. Sebagai variabel penelitian adalah menganalisis Variabel Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan rumus efektivitas, efisiensi dan ekonomi.

Pembahasan tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan pendekatan Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis, sebagai berikut :

1. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah pada tahun 2015-2019 pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari segi Efektivitas.

Pembahasan tentang Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perhitungan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019.

Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun 2015 = \frac{8.360.152.393.841,95}{9.722.999.846.804,09} \times 100\% = 86\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar 86%, hal ini disebabkan karenan Realisasi Pendapatan yang cukup efektif dalam mencapai target Anggaran Pendapatan yang sudah dianggarkan seperti pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan lainnya dan pendapatan retribusi daerah.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun 2016 = \frac{6.582.780.929.676,33}{6.999.258.016.791,91} \times 100\% \equiv 94\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016 sebesar 94%, hal ini disebabkan karena Realisasi Pendapatan yang efektif dalam mencapai target Anggaran Pendapatan yang sudah dianggarkan seperti pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan hibah, pendapatan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun 2017 = \frac{8.195.968.131.799,96}{8.911.476.779.409,00} \times 100\% = 92\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017 sebesar 92%, hal ini disebabkan karena Realisasi Pendapatan yang efektif dalam mencapai atau hampir mencapai target Anggaran Pendapatan yang sudah dianggarkan seperti pendapatan pajak daerah dan pendapatan hibah.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Anggaran}{Anggaran Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun 2018 = \frac{9.141.371.395.099,79}{9.196.477.924.456,10} \times 100\% = 99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018 sebesar 99%, hal ini disebabkan karena Realisasi Pendapatan yang efektif dalam mencapai target Anggaran Pendapatan yang sudah dianggarkan seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{9.215.916.111.901,73}{9.783.467.604.746,55} \times 100\% = 94\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2019 sebesar 94%, hal ini disebabkan karena Realisasi Anggaran yang efektif dalam mencapai target Anggaran Pendapatan yang sudah dianggarkan seperti pendapatan pajak daerah dan pendapatan lainnya.

Kesimpulan hasil efektivitas menunjukkan bahwa rasio tahun 2015 sebesar 86% dapat dikatakan cukup efektif, rasio tahun 2016 sebesar 94% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2017 sebesar 92% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2018 sebesar 99% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2019 sebesar 94% dapat dikatakan efektif.

b. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja Keuangan Daerah dikatakan efektif bila rasio mencapai 100%, maka semakin tinggi rasio efektivitas berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik sebaliknya semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk Kinerja Keuangan Daerahnya. Pengukuran efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2019 dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

Tabel IV. 1
Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio
2015	8.360.152.393.841,95	9.722.999.846.804,09	86%
2016	6.582.780.929.676,33	6.999.258.016.791,91	94%
2017	8.195.968.131.799,96	8.911.476.779.409,00	92%
2018	9.141.371.395.099,79	9.196.477.924.456,10	99%
2019	9.215.916.111.901,73	9.783.467.604.746,55	94%

Sumber : BPKAD, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja keuangan daerah menunjukkan penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 cukup efektif, pada realisasi pendapatan sebesar Rp 8.360.152.393.841,95 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih dari target anggaran

pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 9.722.999.846.804,09 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan transfer pemerintah pusat, karena jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2015 sebesar Rp.2.329.728.331.330,00 pada realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan lain-lainnya sebesar Rp.2.000.009.809,75. Dari target anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan transfer pemerintah pusat, karena pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2015 sebesar Rp.2.839.125.943.171,00 pada anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.13.495.183.575,00.

pada tahun 2016 realisasi pendapatan efektif karena realisasi pendapatan sebesar Rp.6.582.780.929.676,33 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar dari target anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.6.999.258.016.791,91 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan transfer pemerintah pusat, karena jumlah pendapatan transfer pemerintah

pusat pada tahun 2016 sebesar Rp.2.506.312.481.085,00 pada realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hibah sebesar Rp.3.354.520.000,00 Dari target anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena pendapatan pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.2.911.760.715.578,98 pada anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan lainnya sebesar Rp.0,00.

pada tahun 2017 realisasi pendapatan efektif karena realisasi pendapatan sebesar Rp.8.195.968.131.799,96 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar dari target anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.8.911.476.779.409,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp.2.835.440.186.799,80 pada realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hibah sebesar Rp.4.233.286.734,00. Dari target anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena pendapatan pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp.2.911.883.386.175,00 pada anggaran pendapatan yang

memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hibah sebesar Rp.3.358.000.000,00

pada tahun 2018 realisasi pendapatan efektif karena realisasi pendapatan sebesar Rp.9.141.371.395.099,79 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar dari target anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.9.196.477.924.456,10 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.3.197.900.645.678,09 pada realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hibah sebesar Rp.4.188.163.778,00. Dari target anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena pendapatan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp.2.990.093.000.000,00 pada anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan lainnya sebesar Rp.435.500.000,00.

pada tahun 2019 realisasi pendapata efektif karena realisasi pendapatan sebesar Rp.9.215.916.111.901,73 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih besar dari target anggaran

pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.9.783.467.604.746,55 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.3.145.558.634.339,38 pada realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan lainnya sebesar Rp.639.250.000,00. Dari target anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, karena pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp.3.071.784.718.796,00 pada anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan lainnya sebesar Rp.957.129.000,00.

Kesimpulan hasil efektivitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tahun 2015 sebesar 86% dapat dikatakan cukup efektif, rasio tahun 2016 sebesar 94% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2017 sebesar 92% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2018 sebesar 99% dapat dikatakan efektif, pada rasio tahun 2019 sebesar 94% dapat dikatakan efektif. Kinerja Keuangan Daerah dikatakan efektif karena, tingkat realisasi sudah mencapai target anggaran disebabkan target Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan terlalu tinggi sehingga tidak tercapai dalam realisasi. Penyebab meningkatnya penerimaan anggaran dikarenakan semakin

bertambahnya jumlah perusahaan dan sektor-sektor pembangunan perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, penyebab menurunnya penerimaan anggaran dikarenakan kurangnya realisasi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas selama tahun 2015-2019 sudah mencapai target, disebabkan karena anggaran pendapatan asli daerah setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga tercapainya dalam realisasi pendapatan.

2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 ditinjau dari segi efisiensi

Pembahasan tentang efisiensi Kinerja Keuangan Daerah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perhitungan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya\ Untuk\ Memperoleh\ Pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2015 = \frac{4.496.851.160.889,22}{8.360.152.393.841,95} \times 100\% = 54\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar 54%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan minimum dalam mencapai target realisasi pendapatan yang maksimum.

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$Tahun 2016 = \frac{4.094.471.321.477,03}{6.582.780.929.676,33} \times 100\% = 62\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 62%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mampu mrnggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan minimum dalam mencapai target realisasi pendapatan yang maksimum.

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$Tahun 2017 = \frac{5.788.522.526.667,59}{8.195.968.131.799,96} \times 100\% = 71\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 71%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan minimum dalam mencapai target realisasi pendapatan yang maksimum.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya\ Untuk\ Memperoleh\ Pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2018 = \frac{6.763.760.533.371,09}{9.141.371.395.099,79} \times 100\% = 74\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 74%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan minimum dalam mencapai target realisasi pendapatan yang maksimum.

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Biaya\ Untuk\ Memperoleh\ Pendapatan}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2019 = \frac{6.418.398.930.897,59}{9.215.916.111.901,73} \times 100\% = 70\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 70%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan minimum dalam mencapai target realisasi pendapatan yang maksimum.

Kesimpulan dari perhitungan efisiensi Kinerja Keuangan Daerah bahwa tahun 2015 tingkat efisiensinya sebesar 54%, tahun 2016 meningkat sebesar 62%, tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 71%, tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 74%, tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 70%.

b. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengukuran efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2019 dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Kinerja Keuangan Daerah dikatakan efisien bila rasio mencapai 100%. Semakin rendah rasio efisiensi berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik sebaliknya semakin

tinggi rasio efisiensi berarti semakin buruk Kinerja Keuangan Daerahnya.

Tabel IV. 2
Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio
2015	4.496.851.160.889,22	8.360.152.393.841,95	54%
2016	4.094.471.321.477,03	6.582.780.929.676,33	62%
2017	5.788.522.526.667,59	8.195.968.131.799,96	71%
2018	6.763.760.533.371,09	9.141.371.395.099,79	74%
2019	6.418.398.930.897,54	9.215.916.111.901,73	70%

Sumber : BPKAD, 2020

Berdasarkan hasil efisiensi pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio tahun 2015 sebesar 54% dapat dikatakan sangat efisien, rasio tahun 2016 sebesar 62% dapat dikatakan efisien, pada rasio tahun 2017 sebesar 71% dapat dikatakan efisien, pada rasio tahun 2018 sebesar 74% dapat dikatakan efisien, pada rasio tahun 2019 sebesar 70% dapat dikatakan efisien. Kinerja Keuangan Daerah dikatakan efisien karena Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan realisasi belanja tidak boleh melebihi pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, apabila Belanja Daerah melebihi standar rasio yang telah ditentukan maka Kinerja Keuangan Daerah dikatakan tidak efisien.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi selama tahun 2015-2019 terjadi secara efisien, hal ini disebabkan karena Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target, dapat dilihat dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 ditinjau dari segi Ekonomi.

Pembahasan tentang Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perhitungan Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.496.851.160.889,22}{5.609.583.728.017,00} \times 100\% = 80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar 80%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menghemat pengeluaran Belanja Daerah yang tidak melebihi Anggaran Pengeluaran, seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan

jaringan, belanja modal asset lainnya dan belanja bantuan sosial.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{4.094.071.321.477,03}{4.496.474.573.009,91} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebesar 91%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menghemat pengeluaran Belanja Daerah yang tidak melebihi Anggaran Pengeluaran, seperti belanja barang dan jasa, belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal BLUD.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{5.788.552.526.667,59}{6.439.523.470.869,00} \times 100\% = 90\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebesar 90% hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menghemat pengeluaran Belanja Daerah yang tidak melebihi Anggaran Pengeluaran, seperti belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja BLUD, belanja modal gedung dan bangunan.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{6.763.760.533.371,09}{7.426.770.057.057,95} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 sebesar 91%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menghemat pengeluaran Belanja Daerah yang tidak melebihi Anggaran Pengeluaran, seperti belanja hibah, belanja BLUD, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja tak terduga.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{6.418.398.930.897,59}{7.074.829.339.229,22} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebesar 91%, hal ini disebabkan karenan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah menghemat pengeluaran Belanja Daerah yang tidak melebihi Anggaran Pengeluaran, seperti belanja barang dan jasa, belanja modal tanah, belanja tak terduga dan belanja modal aset tetap lainnya.

Kesimpulan dari perhitungan ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bahwa tahun 2015 tingkat ekonomisnya sebesar

80%, tahun 2016 meningkat sebesar 91%, tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 90%, tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 91%, tahun 2019 sama dari tahun sebelumnya sebesar 91%.

b. Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pengukuran ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019 dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan ekonomi bila rasio mencapai 100%, maka semakin rendah rasio ekonomi berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik sebaliknya semakin tinggi rasio ekonomi berarti semakin buruk Kinerja Keuangan Pemerintah Daerahnya.

Tabel IV. 3
Rasio Ekonomis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2016

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio
2015	4.496.851.160.889,22	5.609.583.728.017,00	80%
2016	4.094.071.321.477,03	4.496.474.573.009,91	91%
2017	5.788.552.526.667,59	6.439.523.470.869,00	90%
2018	6.763.769.533.371,09	7.426.770.057.057,95	91%
2019	6.418.398.930.897,59	7.074.829.339.229,22	91%

Sumber : BPKAD, 2020

Berdasarkan hasil rasio ekonomi pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tahun 2015 sebesar 80% dapat dikatakan cukup ekonomi, rasio tahun 2016 sebesar 91% dapat dikatakan ekonomis, pada rasio tahun 2017 sebesar 90% dapat dikatan ekonomis, pada rasio tahun 2018 sebesar 91% dapat dikatakan ekonomis, pada rasio tahun 2019 sebesar 91% dapat dikatakan ekonomis. Kinerja Keuangan Daerah dikatakan ekonomis karena Pemerintah Daerah sudah menghemat dalam menganggarkan anggaran realisasinya. Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio ekonomis tahun 2015-2019. Pengelola keuangan anggaran belum optimal karena terdapat aktivitas yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan adanya pengadaan barang dan jasa yang melebihi kebutuhan adanya pemborosan keuangan dan tingginya harga pada penyusunan anggaran. Sehingga mengakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan pengannggaran program. Penyebabnya pada fungsi-fungsi terkait seperti fungsi ororisas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi yang tidak berjalan sebagai mana semestinya sesuai dengan teori fungsi anggaran dan pendapatan belanja daerah.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ekonomi selama tahun 2015-2019 terjadi secara ekonomi, hal ini dikarenakan kegiatan operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan yang membutuhkan anggaran

operasional yang besar salah satunya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Hasil pembahasan Kinerja Keuangan daerah pada tahun 2015-2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan efektivitas, efisiensi dan ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah provinsi sumatera selatan sudah efektif, kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerahnya sudah efisien, kinerja keuangan daerah sudah ekonomis karena dilihat dari pembangunan kinerja keuangan daerahnya membutuhkan anggaran operasional yang besar.

4. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 ditinjau dari segi *Outcome*.

a. Peran Retrospektif

Peran retrospektif yaitu, peran yang terkait dengan penilaikan kinerja pada masa lalu, analisis peran retrospektif memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target dimasa yanag akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik, selain itu dapat juga digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam menentukan program atau proyek yang perlu dilaksanakan dan

metode terbaik mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan suatu program tersebut.

Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan memberikan penyuluhan sosialisasi melalui seminar kepada masyarakat maupun pembina agar masyarakat lebih mengerti dan menyadari pentingnya untuk membayar pajak dan retribusi karena penerimaan pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapat daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Tabel IV.4
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019.
(Pendapatan Pajak Daerah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan
2015	2.324.865.133.161,95	2.510.784.537.684,00
2016	2.378.960.064.732,96	2.911.760.715.578,98
2017	2.835.440.186.799,80	2.911.883.386.175,00
2018	3.197.900.645.678,09	2.990.093.000.000,00
2019	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,38

Sumber : Kantor BPKAD, 2020

Berdasarkan hasil Kinerja Keuangan Daerah dapat dikatakan *outcome* karena jumlah pembayaran pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap tahunnya sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel IV. 5
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019.
(Pendapatan Retribusi Daerah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan
2015	17.229.350.901,00	13.495.183.575,00
2016	18.403.609.038,90	18.261.896.000,00
2017	15.442.784.360,00	14.542.756.000,00
2018	11.915.489.824,62	10.618.399.000,00
2019	12.038.355.783,00	9.136.079.600,00

Sumber : Kantor BPKAD, 2020

Berdasarkan Kinerja Keuangan daerah dapat dikatakan *outcome* karena pendapatan retribusi daerah sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dikarenakan semakin banyaknya jasa usaha atau pelayanan di daerah-daerah.

b. Peran Prospektif

Peran prospektif yaitu, terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang sebagai peran prospektif, pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis Retrospektif memberikan bukti terhadap praktik yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target dimasa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik atau dapat juga bukti tersebut digunakan untuk membantu pembuat keputusan dalam menentukan program mana yang perlu

dilaksanakan dan metode mana yang perlu digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Program yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat hasil kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan anggaran belanja dibandingkan anggaran pendapatan karena dari perhitungan tingkat efisien menunjukkan hasil yang efisien anggaran dari tahun 2015-2019. Laporan keuangan memperlihatkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel IV. 5
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2015-2019.
(Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan
2015	630.090.477.373,26	1.027.728.605.015,00
2016	344.024.400.563,53	457.643.624.619,20
2017	617.237.875.310,81	767.399.317.000,00
2018	700.921.021.324,50	798.028.873.499,52
2019	1.122.895.786.652,54	1.154.622.729.147,87

Sumber : Kantor BPKAD, 2020

Berdasarkan Kinerja Keuangan Dapat dikatakan *outcome* karenan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setiap tahunnya semakin meningkat, dikarenakan adanya perbaikan atau pembuatan jalan, jembatan, gedung dan bangunan.

Hasil pembahasan Kinerja keuangan daerah pada tahun 2015-2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan efektivitas, efisiensi dan ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah provinsi sumatera selatan sudah efektif, kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerahnya sudah efisien, kinerja keuangan daerah sudah ekonomis karena dilihat dari pembangunan kinerja keuangan daerahnya membutuhkan anggaran operasional yang besar, maka *outcome* yang dihasilkan sudah baik dikarenakan setiap tahunnya semakin meningkat pembayaran pajak daerah, retribusi dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan pendekatan efektivitas, efisien dan ekonomis, menjelaskan sebagai berikut :

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 dikatakan efektif karena hasil perhitungan kinerja keuangan daerah pada tahun 2015 sebesar 86% pada tahun 2016 sebesar 94% pada tahun 2017 sebesar 92% pada tahun 2018 sebesar 99% dan pada tahun 2019 sebesar 94%.

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2016 dikatakan efisien karena hasil perhitungan kinerja keuangan daerah pada tahun 2015 sebesar 54% pada tahun 2016 sebesar 62% pada tahun 2017 sebesar 71% pada tahun 2018 sebesar 74% pada tahun 2019 sebesar 70%.

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 dikatakan ekonomis karena hasil perhitungan kinerja keuangan daerah pada tahun 2015 sebesar 80% pada tahun 2016 sebesar 91% pada tahun 2017 sebesar 90%, pada tahun 2018 sebesar 91%, pada tahun 2019 sebesar 91%.

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 dikatakan *outcome* yang dihasilkan sudah baik dikarena pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sudah memenuhi peraturan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan

Dilihat dari rasio efektivitas, bagi kantor BPKAD lebih meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk tahun-tahun selanjutnya terutama pada efektivitas. Untuk efisiensi dan ekonomis kinerja keuangan daerah tetap dipertahankan agar kinerja keuangan daerahnya lebih baik.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambah periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah.